

Genosidia Srebrenica: Pertarungan Identitas Agama dan Politik

Aprilia Maharani Putri

UIN Sunan Ampel Surabaya

liiamhrani@gmail.com

Achmad Zuhdi DH

UIN Sunan Ampel Surabaya

achmadzuhdi@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas genosida Srebrenica tahun 1995 sebagai puncak dari konflik etnis dan politik identitas di Bosnia dan Herzegovina setelah runtuhnya Yugoslavia. Penelitian ini berfokus untuk menelusuri penyebab pecahnya perang Bosnia, peran politik identitas dalam pembersihan etnis, serta alasan terjadinya genosida meskipun Srebrenica berada di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menggunakan metode penelitian sejarah atau heuristik dan analisis deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder, penelitian ini juga menerapkan teori identitas sosial dari Henri Tajfel dan John Turner untuk menjelaskan bagaimana perbedaan identitas agama dan etnis dimanipulasi menjadi alat politik yang memecah masyarakat multi-etnis Bosnia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang Bosnia dipicu oleh runtuhnya struktur politik Yugoslavia, krisis ekonomi, serta kebangkitan nasionalisme etnis yang dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperluas kekuasaan. Identitas agama dan etnis digunakan sebagai alat propaganda dan pembenaran kekerasan yang berkembang menjadi pembersihan etnis terhadap Muslim Bosnia. Tragedi Srebrenica terjadi akibat lemahnya mandat PBB, ketimpangan militer akibat embargo senjata, serta kegagalan komunitas internasional dalam bertindak tegas. Kajian ini menegaskan bahwa politik identitas tanpa tanggung jawab kemanusiaan dapat melahirkan kekerasan struktural dan tragedi kemanusiaan berskala besar.

Kata Kunci: *Bosnia, Genosida Srebrenica, PBB, Politik Identitas*

PENDAHULUAN

Runtuhnya negara Yugoslavia pada awal 1990-an menjadi titik balik besar dalam sejarah Eropa modern. Krisis ekonomi, melemahnya pengaruh ideologi komunis, serta bangkitnya nasionalisme etnis membuat wilayah Balkan, termasuk Bosnia dan Herzegovina, terjerumus ke dalam perang. Bosnia, dengan komposisi penduduk yang mayoritasnya Bosniak Muslim, Serb Ortodoks, dan Kroat Katolik menjadi medan konflik yang paling rumit. Perbedaan identitas yang sebelumnya bisa hidup berdampingan berubah menjadi garis pemisah yang menyalakan api perang.

Salah satu tragedi paling kelam dari perang ini adalah genosida di Srebrenica pada Juli 1995. Kota kecil ini sebelumnya ditetapkan sebagai “safe area” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi justru menjadi tempat pembantaian lebih dari 8.000 laki-laki dan anak laki-laki Muslim Bosnia oleh pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Ratko Mladić. Peristiwa ini menjadi genosida pertama di Eropa setelah Holocaust, dan hingga

kini dikenang sebagai bukti kegagalan dunia internasional dalam mencegah bencana kemanusiaan (Rachmawati dkk, 2023).

Dalam bukunya *How Bosnia Armed*, Marko Attila Hoare menjelaskan bagaimana Bosnia yang pada awalnya sangat rentan dan kurang persenjataan dibangun pertahanannya dalam masa perang. Bosnia memulai konflik hampir tanpa angkatan bersenjata yang kuat, dan sangat bergantung pada sukarelawan, polisi lokal, dan sedikit dukungan luar. Proses pembentukan Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina (ARBiH) melibatkan persuasi politik, organisasi identitas, dan kebutuhan praktis untuk melindungi masyarakat mereka sendiri. Hoare menggambarkan bahwa perang itu pada awalnya mempunyai nuansa multietnis yang cukup kuat, tetapi cepat berubah ketika tekanan militer Serb dan Kroat, embargo senjata internasional, serta pengkhianatan internal (misalnya kontrol militer yang tidak merata, konflik kepentingan) memaksa pihak Bosniak untuk mempertahankan diri secara eksistensial. (Hoare, 2004).

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan, yakni; Apa alasan utama dari pecahnya perang di Bosnia; Bagaimana politik identitas di Bosnia memicu pembersihan etnis di Srebrenica; dan Mengapa genosida tetap bisa terjadi meskipun Srebrenica berada di bawah perlindungan PBB. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menelusuri faktor sejarah, politik, dan identitas yang berperan dalam terjadinya tragedi Srebrenica. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memahami genosida bukan hanya sebagai tindakan kekerasan massal atau pembersihan etnis, tetapi juga sebagai hasil dari pertarungan identitas agama dan politik di tengah situasi perang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi yang kemudian ditulis dengan metode analisis- deskriptif. Kerangka teoretis yang digunakan adalah teori konstruksi identitas sosial (Tajfel & Turner, 1986), yang melihat identitas kelompok dibentuk melalui proses sosial, politik, dan sejarah. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana perbedaan agama dan etnis di Bosnia dipolitisasi hingga melahirkan diskriminasi, konflik, dan akhirnya

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari sisi akademik dan kemanusiaan. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian sejarah dan politik Balkan dengan menghubungkan konflik identitas dan praktik genosida. Dari sisi kemanusiaan, penelitian ini memberi refleksi penting mengenai bahaya politik identitas ketika dipadukan dengan kebencian agama dan lemahnya perlindungan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan pecahnya perang

Bosnia dan Herzegovina adalah sebuah wilayah yang sejak lama dihuni oleh beragam kelompok etnis. Mayoritas penduduknya terdiri dari Muslim Bosnia (Bosniak), Serbia Ortodoks, dan Kroasia Katolik. Keberagaman ini pada satu sisi menunjukkan

kekayaan budaya, tetapi pada sisi lain juga menjadi potensi konflik ketika identitas dipolitisasi. Pada masa Kekaisaran Ottoman, banyak orang Bosnia memeluk Islam dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial kekaisaran. Setelah Ottoman runtuh, Bosnia sempat berada di bawah kekuasaan Austro-Hungaria, lalu menjadi bagian dari Kerajaan Yugoslavia setelah Perang Dunia I. Pada masa itu, ketegangan antar-etnis sering kali muncul, meskipun belum berkembang menjadi perang besar.

Situasi relatif stabil baru tercipta setelah Perang Dunia II, ketika Josip Broz Tito memimpin Yugoslavia. Tito menerapkan sistem federal yang memberi otonomi kepada setiap republik, termasuk Bosnia. Identitas etnis ditekan dengan narasi “Yugoslavisme”, yaitu ide persatuan yang melampaui perbedaan agama dan etnis (Carmichael, 2012). Namun, stabilitas ini bersifat sementara karena sangat bergantung pada figur Tito. Setelah Tito meninggal pada tahun 1980, sistem politik mulai rapuh. Tanpa kepemimpinan yang kuat, ketegangan etnis kembali mencuat. Ditambah lagi, krisis ekonomi pada dekade 1980-an memperburuk kondisi. Tingkat pengangguran meningkat, inflasi melambung, dan banyak rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah federal Yugoslavia.

Memasuki 1990-an, gelombang nasionalisme melanda seluruh wilayah Yugoslavia. Elit politik di masing-masing republik melihat nasionalisme etnis sebagai cara efektif untuk menggalang dukungan (Lampe, 2025). Di Serbia, Slobodan Milošević menggunakan propaganda nasionalis untuk menguatkan posisinya. Ia menghidupkan kembali narasi lama bahwa orang Serbia adalah korban sejarah yang terus-menerus ditindas, baik oleh Ottoman, Austro-Hungaria, maupun oleh kelompok etnis lain di Yugoslavia. Propaganda ini menyulut semangat untuk membangun “Serbia Raya”, yaitu gagasan menyatukan seluruh wilayah yang dihuni etnis Serbia.

Di sisi lain, Kroasia di bawah Franjo Tuđman juga mengembangkan nasionalismenya sendiri. Kroasia yang baru merdeka berusaha memperluas pengaruhnya hingga ke Bosnia, khususnya di wilayah yang banyak dihuni etnis Kroasia. Sementara itu, di Bosnia, Alija Izetbegović berusaha mempertahankan integritas wilayah Bosnia yang merdeka (Lampe, 2025). Posisi Bosnia sangat sulit karena di dalam satu negara terkandung tiga kelompok besar dengan kepentingan berbeda: Bosniak ingin mempertahankan negara Bosnia yang berdaulat, Serbia Bosnia ingin bergabung dengan Serbia Raya, sedangkan Kroasia Bosnia cenderung mendukung Kroasia.

Runtuhnya Yugoslavia menjadi titik balik. Slovenia dan Kroasia lebih dulu menyatakan kemerdekaan pada 1991, diikuti oleh Bosnia pada awal 1992. Bosnia mengadakan referendum yang menghasilkan mayoritas suara untuk kemerdekaan. Namun, referendum ini ditolak keras oleh Serbia Bosnia yang tidak ingin dipisahkan dari Serbia. Dengan dukungan militer dan politik dari Beograd, Serbia Bosnia segera membentuk entitas politik sendiri bernama Republika Srpska (Rachmawati dkk, 2023). Mereka juga mulai mengorganisir milisi bersenjata untuk menguasai wilayah-wilayah di Bosnia yang dianggap “milik Serbia”.

Di balik semua itu, perang Bosnia juga dipicu oleh kegagalan komunitas internasional dalam mencegah eskalasi konflik. Eropa Barat dan PBB awalnya enggan terlibat terlalu jauh, karena menganggap konflik ini sebagai urusan internal Yugoslavia. Embargo senjata yang diberlakukan justru melemahkan posisi Bosnia, sementara Serbia yang sudah memiliki kekuatan militer besar tetap bisa bertahan. Akibatnya, ketidakadilan militer semakin memperburuk situasi di lapangan.

Politik Identitas

Pada masa Yugoslavia di bawah Josip Broz Tito, identitas etnis relatif diredam oleh identitas bersama sebagai “orang Yugoslavia.” Namun, setelah kematian Tito pada 1980 dan krisis ekonomi yang melanda pada 1980-an, perbedaan etnis mulai mencuat kembali. Perbedaan itu kemudian dimanfaatkan oleh elit politik yang sedang berusaha mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka.

Pada awal 1990-an, ketika Yugoslavia mulai runtuh, muncul kebangkitan nasionalisme di berbagai wilayah. Di Serbia, Slobodan Milošević mengusung gagasan “Serbia Raya” (Greater Serbia) yang ingin menyatukan seluruh wilayah yang dihuni orang Serbia. Di Kroasia, Franjo Tuđman mendorong ide negara Kroasia merdeka. Sementara itu, di Bosnia, Presiden Alija Izetbegović berusaha mempertahankan integritas wilayah Bosnia yang multietnis. Ketiga arus politik ini saling bertabrakan. Dalam konteks itulah politik etnis menjadi sangat tajam, dan Bosnia menjadi ajang perebutan kepentingan identitas.

Penting untuk dipahami bahwa politik etnis tidak hanya hadir dalam bentuk retorika. Ia mewujud dalam strategi politik dan militer yang nyata. Elite politik Serbia Bosnia, dengan dukungan Beograd, membangun narasi bahwa orang Serbia di Bosnia terancam oleh mayoritas Muslim. Media dikendalikan untuk menyebarkan propaganda yang memperkuat ketakutan ini. Identitas agama yang sebelumnya menjadi bagian dari keragaman Bosnia kini dipakai sebagai garis pemisah. Artikel akademik yang membahas hubungan agama dan nasionalisme di Bosnia mencatat bahwa agama diubah menjadi simbol politik; Muslim dianggap sebagai “yang lain” yang harus dicurigai dan pada akhirnya disingkirkan (George Fox University, 2017).

Narasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam strategi militer. Di banyak wilayah Bosnia, milisi Serbia mulai mengusir penduduk Muslim dari desa-desa mereka, membakar rumah, menghancurkan masjid, dan membunuh warga sipil. Proses ini dikenal sebagai “ethnic cleansing” atau pembersihan etnis. Tujuannya bukan sekadar mengalahkan musuh, tetapi menciptakan wilayah homogen yang hanya dihuni oleh orang Serbia. Penelitian Muhidin Mulalić (2019) menegaskan bahwa pembersihan etnis di Bosnia bukan kekerasan acak, tetapi tindakan yang direncanakan dengan sistematis untuk mengubah komposisi demografis suatu wilayah.

Srebrenica menjadi contoh paling jelas dari strategi ini. Kota kecil yang terletak di Bosnia timur itu pada awal perang menjadi tempat perlindungan bagi ribuan Muslim

Bosnia yang melarikan diri dari desa-desa sekitar. Pada 1993, PBB menetapkan Srebrenica sebagai “safe area,” atau zona aman yang seharusnya dilindungi dari serangan militer. Namun, status ini lebih bersifat simbolis daripada nyata. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di sana tidak memiliki mandat militer yang kuat, jumlahnya terbatas, dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan ofensif (Daalder, 1998). Akibatnya, perlindungan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar hadir.

Politik identitas memainkan peran penting dalam keputusan militer Serbia Bosnia untuk menargetkan Srebrenica. Bagi mereka, Srebrenica adalah simbol perlawanan Muslim di wilayah timur Bosnia. Dengan menaklukkan kota itu dan mengusir atau membunuh penduduk Muslimnya, Serbia Bosnia ingin memastikan dominasi etnis di daerah tersebut. Pada Juli 1995, pasukan Jenderal Ratko Mladić menyerbu kota itu. Ribuan pria dan anak laki-laki Muslim dipisahkan dari perempuan dan anak-anak, lalu dieksekusi secara massal. Perempuan dan anak-anak dipaksa meninggalkan kota, sementara banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Laporan Holocaust Museum Houston mencatat bahwa tindakan ini tidak bisa dipisahkan dari logika politik etnis yang telah dibangun sejak awal perang (HMH, 2023).

Tragedi Srebrenica kemudian diakui oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai tindakan genosida. Ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya memicu perang, tetapi juga berujung pada kejahatan paling serius dalam hukum internasional. Dalam perspektif teori identitas sosial, kasus ini menunjukkan bagaimana elite politik mampu mengubah perbedaan identitas menjadi “kami” versus “mereka,” lalu membenarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap kelompok yang dianggap sebagai “musuh.”

Selain itu, kegagalan komunitas internasional memperburuk situasi. Embargo senjata yang diberlakukan PBB sejak awal perang membuat Bosnia sulit memperoleh pertahanan militer, sementara Serbia Bosnia mendapat dukungan senjata dari JNA (Tentara Yugoslavia). Marko Attila Hoare dalam *How Bosnia Armed* (2004) menjelaskan bahwa Bosnia sebenarnya berusaha keras membangun pertahanan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Namun, ketimpangan kekuatan itu membuat wilayah-wilayah seperti Srebrenica menjadi target yang mudah. Lemahnya intervensi internasional juga memberi ruang bagi elite politik Serbia Bosnia untuk melaksanakan agenda pembersihan etnis tanpa takut adanya konsekuensi segera.

Pada akhirnya, politik identitas yang memicu pembersihan etnis di Srebrenica dapat dirangkum dalam tiga tahap besar. Pertama, identitas etnis-agama yang awalnya netral dipolitisasi menjadi alat propaganda. Kedua, elite politik menggunakan identitas ini untuk membenarkan klaim teritorial dan mobilisasi militer. Ketiga, strategi militer dijalankan secara sistematis untuk mengusir dan membunuh kelompok yang dianggap berbeda, dengan tujuan menciptakan wilayah yang homogen. Semua ini diperparah oleh lemahnya perlindungan internasional dan keberpihakan yang tidak seimbang dalam embargo senjata.

Genosida yang terjadi di *safe area* PBB

Tragedi Srebrenica pada Juli 1995 adalah salah satu kegagalan paling besar dalam sejarah intervensi kemanusiaan dunia modern. Kota yang telah ditetapkan sebagai “safe area” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) justru menjadi lokasi pembantaian lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia. Karena hal ini sering timbul pertanyaan mengenai bagaimana genosida bisa terjadi di bawah pengawasan lembaga internasional yang seharusnya berfungsi melindungi warga sipil. Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kelemahan struktural dalam misi PBB, keterbatasan politik internasional, dan kondisi di lapangan yang memperlihatkan ketimpangan kekuatan antara pasukan Serbia Bosnia dan pertahanan Bosnia yang lemah.

Srebrenica ditetapkan sebagai zona aman oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 819 pada April 1993. Resolusi ini dimaksudkan untuk melindungi warga sipil Muslim yang dikepung oleh pasukan Serbia Bosnia. Dalam praktiknya, PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dari Belanda (Dutchbat) di bawah komando UNPROFOR (United Nations Protection Force). Mereka bertugas menjaga keamanan wilayah dan mencegah serangan. Namun, mandat ini bersifat terbatas: pasukan PBB hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan senjata untuk membela diri, bukan untuk menyerang atau melakukan tindakan ofensif terhadap pihak yang melanggar kesepakatan (Hoare, 2004). Akibatnya, status “zona aman” Srebrenica hanya menjadi janji simbolik tanpa perlindungan nyata.

Salah satu penyebab utama kegagalan PBB adalah lemahnya mandat militer. Mandat UNPROFOR tidak dirancang untuk menghadapi perang bersenjata yang kompleks seperti di Bosnia. Misi perdamaian ini seharusnya ditempatkan di wilayah yang sudah tenang, bukan di tengah konflik aktif. Sejarawan dan analis konflik seperti Samantha Power dalam tulisannya *A Problem from Hell: America and the Age of Genocide* menjelaskan bahwa pasukan PBB di Bosnia dihadapkan pada dilema antara netralitas dan tanggung jawab moral. Mereka diinstruksikan untuk menjaga perdamaian, tetapi tidak diberi kewenangan untuk melawan agresi yang nyata. Akibatnya, mereka menjadi saksi pasif atas kejahatan yang terjadi di depan mata mereka.

Selain mandat yang lemah, faktor politik internasional juga berperan besar. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis enggan mengerahkan kekuatan militer penuh di Bosnia karena takut terjebak dalam konflik berkepanjangan (Daalder, 1998). Embargo senjata yang diberlakukan terhadap seluruh wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991 memperburuk keadaan, karena membuat Bosnia—yang baru memproklamasikan kemerdekaan dan tidak memiliki pasukan kuat—tidak mampu mempertahankan diri, sementara Serbia masih memiliki akses ke persenjataan besar milik tentara Yugoslavia (JNA). Dalam buku *How Bosnia Armed* karya Marko Attila Hoare (2004), dijelaskan bahwa embargo ini menciptakan ketimpangan militer ekstrem: pasukan Serbia memiliki tank, artileri, dan logistik lengkap, sementara pasukan Bosnia sering kali hanya bersenjata ringan. Hoare menegaskan bahwa embargo tersebut,

meskipun dimaksudkan untuk menekan kekerasan, justru memberi keuntungan besar bagi pihak agresor.

Sementara itu, pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Jenderal Ratko Mladić memanfaatkan kondisi ini. Mereka memahami bahwa pasukan PBB tidak akan menyerang terlebih dahulu dan tidak memiliki dukungan udara yang signifikan. Dengan dukungan logistik dan strategi militer yang matang, pasukan Serbia mulai memperketat pengepungan Srebrenica sejak awal 1995. Setiap jalur suplai makanan dan obat-obatan diputus, membuat warga sipil di kota itu hidup dalam kondisi kelaparan dan kelelahan.

Penyerangan besar dimulai pada 6 Juli 1995, dimana pasukan Serbia mulai memasuki dan menyerang penduduk Srebrenica. Pasukan UNPROFOR saat itu tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan sumber daya mulai dari pangan hingga senjata. Hal ini menyebabkan para pengungsi yang mendiami pinggir kota Srebrenica lari ke tengah kota. Puncaknya, pada tanggal 10 Juli 1995 UNPROFOR mengirimkan permintaan bantuan udara dari komandan Dutchbat namun ditolak oleh markas besar PBB di Sarajevo dan New York. Alasan utamanya adalah ketakutan akan membahayakan pasukan PBB yang menjadi sandera di daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan politik lebih diutamakan daripada keselamatan warga sipil. Dalam laporan resmi PBB yang dirilis pada tahun 1999 berjudul *The Fall of Srebrenica*, disebutkan bahwa salah satu akar kegagalan terbesar adalah koordinasi yang buruk antara Dewan Keamanan, komando militer, dan pasukan di lapangan. Tidak ada kejelasan tentang kapan dan dalam kondisi apa kekuatan militer boleh digunakan.

Kelemahan sistem ini semakin diperparah oleh ilusi netralitas. PBB menganggap bahwa menjaga netralitas berarti tidak boleh berpihak, padahal dalam konflik genosida, netralitas justru menguntungkan pihak yang melakukan kekerasan. Netralitas semu ini membuat PBB enggan menuduh pihak Serbia Bosnia secara langsung, bahkan ketika bukti kekerasan sudah jelas terlihat.

Selain faktor politik dan mandat, ada pula persoalan struktural dalam konsep “safe area” itu sendiri. Zona aman seperti Srebrenica tidak didukung oleh sistem pertahanan yang memadai. Tidak ada perimeter militer yang kuat, tidak ada jalur logistik tetap, dan tidak ada mekanisme evakuasi yang jelas jika terjadi serangan. Dalam praktiknya, “zona aman” justru menjadi perangkap bagi ribuan warga sipil. Mereka berkumpul dalam wilayah kecil yang dikelilingi pasukan musuh, tanpa perlindungan yang cukup. Ketika pasukan Serbia masuk ke kota itu pada 11 Juli 1995, tidak ada perlawanan berarti. Pasukan PBB di pos utama hanya bisa menonton ketika warga sipil dipisahkan, dideportasi, atau dibunuh.

Pada tanggal 12 Juli 1995, setelah kota Srebrenica jatuh ke tangan pasukan Serbia Bosnia, ribuan warga Muslim Bosnia berbondong-bondong mencari perlindungan di kompleks PBB di Potočari. Namun, pasukan PBB Belanda yang bertugas tidak mampu menghentikan pasukan Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladić. Di bawah tekanan dan ancaman, pasukan Serbia mulai memisahkan para pengungsi: perempuan,

anak-anak, dan lansia diarahkan ke bus untuk dievakuasi menuju wilayah Tuzla yang dikuasai Bosnia, sedangkan pria dan remaja laki-laki dipisahkan dengan alasan pemeriksaan keamanan. Pemisahan inilah yang menjadi awal dari rangkaian pembunuhan massal yang terencana.

Kemudian pada tanggal 13-14 Juli 1995, ribuan pria dan remaja laki-laki yang ditangkap di sekitar Srebrenica dan Bratunac dibawa ke lokasi-lokasi terpencil seperti gudang Kravica, sekolah di Bratunac, dan ladang-ladang di sekitar desa Pilica. Di tempat-tempat itu, mereka ditembak secara massal dalam kelompok besar, lalu dikubur di kuburan dangkal yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat yang sama, ribuan lainnya mencoba melarikan diri melalui hutan menuju Tuzla, namun banyak yang tertangkap atau tewas dalam penyergapan di sepanjang rute pelarian tersebut.

Mulai tanggal 15 hingga 16 Juli 1995, operasi pembunuhan berlanjut di berbagai titik di sekitar Zvornik dan daerah Liplje. Mayat para korban kemudian dipindahkan ke kuburan massal sekunder menggunakan alat berat, dengan tujuan menghapus jejak kejahatan. Sementara itu, perempuan dan anak-anak yang dievakuasi dari Potočari baru tiba di wilayah aman dalam kondisi trauma berat, tanpa kabar tentang keluarga mereka. Dalam beberapa hari singkat itu, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Bosnia dibunuh.

Banyak analisis juga menunjukkan bahwa kegagalan Srebrenica bukan semata kesalahan teknis, melainkan kegagalan moral dan politik dunia internasional. Dunia tahu bahwa kekerasan sistematis sedang terjadi di Bosnia, tetapi responnya selalu tertunda. Dalam laporan Human Rights Watch berjudul *The Fall of Srebrenica and the Failure of UN Peacekeeping*, disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB gagal menegakkan mandatnya sendiri karena negara-negara anggota utama tidak mau menanggung risiko politik dan militer. Mereka ingin menjaga citra PBB tetap “netral” tanpa harus mengorbankan sumber daya yang besar.

Selain itu, hubungan antara PBB dan NATO yang seharusnya menjadi kekuatan pelindung juga terhambat oleh birokrasi. Serangan udara baru disetujui setelah situasi memburuk, dan pada saat itu, sudah terlambat. Ribuan warga Muslim telah dieksekusi dan dikubur di kuburan massal (Rachmawati dkk, 2023). Ketika NATO akhirnya mulai melakukan serangan udara pada Agustus 1995, genosida Srebrenica sudah selesai terjadi.

Srebrenica menjadi simbol dari kegagalan dunia untuk melindungi warga sipil dari genosida, bahkan setelah Holocaust dan berbagai tragedi kemanusiaan lainnya. Setelah perang usai, PBB mengakui tanggung jawab moral atas tragedi tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam pidato peringatannya pada tahun 2000 menyebut bahwa dunia gagal bertindak ketika kejahatan terburuk sedang berlangsung di depan mata. Namun, pengakuan ini tidak bisa menghapus fakta bahwa sistem keamanan internasional pada waktu itu tidak mampu mencegah atau menghentikan genosida.

Genosida di Srebrenica menunjukkan bagaimana keputusan politik internasional, birokrasi diplomatik, dan ketidaksiapan struktural dapat mengorbankan ribuan nyawa.

“Perlindungan” yang dijanjikan oleh PBB ternyata rapuh karena tidak diimbangi dengan komitmen militer dan politik yang tegas. Dalam konteks ini, politik etnis di Bosnia dan politik global saling terkait: di satu sisi, elite lokal memanfaatkan identitas untuk membenarkan kekerasan, dan di sisi lain, dunia internasional gagal memberikan perlindungan yang nyata bagi korban.

Tragedi ini juga menjadi pelajaran penting bagi masa depan kebijakan kemanusiaan internasional. Setelah Srebrenica, muncul konsep “Responsibility to Protect” (R2P) pada awal 2000-an, yang menekankan bahwa negara dan komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk melindungi populasi dari genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa netralitas dan diplomasi semata tidak cukup menghadapi kejahatan sistematis. Namun, Srebrenica tetap menjadi pengingat pahit bahwa perlindungan tanpa kekuatan hanyalah janji kosong.

Dengan demikian, genosida di Srebrenica bisa terjadi bukan karena tidak adanya kesadaran internasional, tetapi karena kegagalan politik dan kelemahan struktural dalam sistem PBB. Pasukan penjaga perdamaian tidak memiliki wewenang dan kemampuan yang cukup, negara-negara besar enggan bertindak tegas, dan konsep “zona aman” ternyata tidak memiliki arti nyata di medan perang. Semua faktor ini berpadu menciptakan situasi di mana ribuan warga sipil menjadi korban di bawah bendera organisasi yang seharusnya melindungi mereka.

KESIMPULAN

Perang Bosnia bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang lahir dari pertarungan identitas dan sejarah panjang di wilayah Balkan. Ketika Yugoslavia runtuh pada awal 1990-an, rasa kebersamaan yang dulu dibangun di bawah kepemimpinan Tito ikut hancur. Masing-masing kelompok etnis mulai menonjolkan perbedaan mereka—antara Serbia yang beragama Ortodoks, Kroasia yang Katolik, dan Bosnia yang mayoritas Muslim. Perbedaan yang sebelumnya hidup berdampingan berubah menjadi batas yang memisahkan. Ketegangan semakin meningkat ketika para pemimpin nasionalis memanfaatkan identitas agama dan etnis untuk mencari dukungan politik. Referendum kemerdekaan Bosnia pada tahun 1992 menjadi titik balik yang memicu pecahnya perang. Bagi sebagian besar Muslim Bosnia, referendum itu adalah langkah menuju kedaulatan. Namun bagi Serbia Bosnia, itu dianggap ancaman terhadap cita-cita mereka untuk membentuk “Serbia Raya”. Sejak saat itu, perang tak terelakkan.

Dalam konflik yang semakin brutal, politik identitas memainkan peran besar dalam memperparah kekerasan. Para pemimpin politik dan militer mengubah perbedaan budaya menjadi alasan untuk membenarkan kebencian. Narasi-narasi propaganda disebarkan melalui media untuk menanamkan ketakutan dan kemarahan terhadap kelompok lain. Muslim Bosnia menjadi target utama karena dianggap sebagai penghalang terbentuknya negara Serbia yang homogen. Pembersihan etnis yang terjadi di berbagai

wilayah, termasuk Srebrenica, menunjukkan bahwa kekerasan itu bukan sekadar kebetulan atau akibat perang semata, tetapi strategi yang direncanakan secara sistematis. Tujuannya jelas, mengusir atau memusnahkan kelompok yang dianggap “berbeda” agar wilayah itu sepenuhnya dikuasai oleh satu identitas etnis. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perlindungan internasional dan embargo senjata yang membuat pihak Bosnia Muslim tidak seimbang secara militer. Politik etnis yang kejam inilah yang akhirnya membuka jalan menuju tragedi genosida.

Srebrenica menjadi bukti paling menyakitkan dari kegagalan dunia internasional. Kota yang dijanjikan sebagai “zona aman” oleh PBB ternyata menjadi kuburan massal bagi lebih dari delapan ribu Muslim Bosnia. Pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di sana tidak memiliki kekuatan dan wewenang untuk mencegah pembantaian itu. Dunia melihat tragedi itu terjadi hampir tanpa berbuat apa-apa. Genosida Srebrenica kemudian menjadi simbol kegagalan sistem keamanan global dalam melindungi manusia dari kekejaman yang dilakukan atas nama politik dan identitas. Dari tragedi ini, muncul kesadaran baru di dunia tentang pentingnya tanggung jawab internasional untuk melindungi warga sipil; sebuah gagasan yang kemudian dikenal sebagai *Responsibility to Protect (R2P)*. Genosida di Srebrenica mengingatkan kita bahwa konflik etnis dan agama tidak hanya menghancurkan negara, tetapi juga kemanusiaan itu sendiri. Bosnia memberi pelajaran bahwa tanpa keadilan, kejujuran sejarah, dan empati lintas identitas, perdamaian sejati hanya akan menjadi mimpi yang rapuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Assembly, G. (1999). *Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35 The Fall of Srebrenica*. New York: United Nations.
- Carmichael, C. (2012). Brothers, Strangers and Enemies: Ethno-Nationalism and the Demise of Communist Yugoslavia. Dalam C. Carmichael, *Brothers, Strangers and Enemies: Ethno-Nationalism and the Demise of Communist Yugoslavia* (hal. 546-560). London: Oxford Handbooks.
- Daalder, I. H. (1998, December 1). *Brookings*. Diambil kembali dari Decision to Intervene: How the War in Bosnia Ended: <https://www.brookings.edu/articles/decision-to-intervene-how-the-war-in-bosnia-ended/>
- Goran Basic, Z. D. (2024). Ideology, War, and Genocide - The Empirical Case of Bosnia and Herzegovina. *Journal of Contemporary Central And Eastern Europe*, 96-107.
- Henry Tajfel, J. T. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. Dalam J. J. Sidanius, *The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour* (hal. 276-293). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203505984-16>
- Hoare, M. A. (2004). *How Bosnia Armed*. London: Saqi Books.
- irmct*. (t.thn.). Diambil kembali dari Srebrenica: Timeline of Genocide.

- Power, S. (2002). *A Problem From Hell: America and the Age of Genocide*. New York: Basic Books.
- Ridha Ayu Rachmawati, H. J. (2023). Analysis Of Bosnia-Herzegovina Armed Conflict. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences*, 1483-1498.
- Solem, E. (2007, June). *Prio*. Diambil kembali dari The Bosnian Civil War: Can factors that contributed to the war still be found in the values of public opinion?
- The Fall of Srebrenica and the Failure of U.N. Peacekeeping. (1995). *Human Rights Watch*.